

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah baik dari sisi tujuan, sasaran dan program

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2018 – 2023.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.2	8.21
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	73.9	74.9	75.9	76.9	77.9	78.9	80.0	80.00
Angka Harapan Hidup	Tahun	65.14	65.86	66.59	67.33	68.07	68.83	69.59	69.59
Perolehan medali emas dalam PON	medali	17	17	-	90	-	-	-	90
Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	68.08	69.19	70.3	71.5	72.6	73.8	75.0	75.00
Cakupan daerah rawan pangan	kab/kota	13	13	11	10	9	7	7	7
Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan	Rp ribu/kapita	6,996	7,093	7,192	7,292	7,393	7,496	7,600	7600
Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	3	3	1	1	1	1	1	5
Rasio kriminalitas yang ditangani	persen	63.62	64.64	65.68	66.73	67.81	68.89	70.00	70.00
Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	75.97	76.42	76.86	77.31	77.77	78.22	78.68	78.68
Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	92.15	92.62	93.09	93.56	94.04	94.52	95.00	95
Nilai skor aspek hak-hak politik	skor	41.13	42.49	43.90	45.35	46.85	48.40	50.00	50
Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	53.45	54.49	55.55	56.63	57.73	58.86	60.00	60.00
Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	85	88	90	93	95	98	100	100
Cakupan Nilai SAKIP	predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB
Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	46.39	80.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00
Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	2.27	2.59	2.95	3.37	3.84	4.38	5.00	5.0
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	0.80	1.09	1.47	2.00	2.71	3.68	5.00	5.00
Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	0.82	1.11	1.50	2.02	2.74	3.70	5.00	5.00
Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	persen	4.53	5.33	6.27	7.37	8.67	10.20	12.00	12
Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	persen	1.94	2.19	2.47	2.79	3.14	3.55	4.00	4

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	persen	8.00	8.30	8.62	8.94	9.28	9.63	10.00	10
Jumlah Kunjungan Wisatawan	ribu orang	900.57	980.50	1067.52	1162.26	1265.42	1377.72	1500.00	1500
Persentase luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	persen	23.93	24.85	25.80	26.79	27.82	28.89	30.00	30
Indeks Kualitas Udara	indeks	90.91	91.58	92.25	92.93	93.62	94.31	95.00	95
Indeks Kualitas Air	indeks	77.33	77.77	78.21	78.65	79.10	79.55	80.00	80
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	78.18	79.28	80.39	81.52	82.66	83.82	85.00	85
Tingkat Kesempatan Kerja	persen	96.01	97.09	97.34	97.59	97.84	98.09	98.34	98.34
Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. juta	52,510,304	54,401,000	56,360,000	58,389,000	60,491,000	62,669,000	64,926,000	64,926,365
Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp.juta	70,038,818	73,744,000	77,645,000	81,753,000	86,078,000	90,632,000	95,427,000	95,425,872
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	30	30	32	40	45	50	55	55
Persentase jembatan provinsi dengan beton dalam kondisi baik	persen	20	20	25	30	35	40	45	45
Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	38.47	39.52	40.61	41.72	42.87	44.04	45.25	45.25
Indeks kampung membangun	Indeks	41.89	43.43	45.02	46.67	48.38	50.16	52.00	52
Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	kelompok	-	-	50	50	50	50	50	250
Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang	-	-	10	20	30	40	50	150
Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
Indeks Pembangunan Gender	indeks	79.38	79.48	79.59	79.69	79.79	79.90	80.00	80.00
Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	61.89	62.40	62.91	63.43	63.95	64.47	65.00	65.00

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018-2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi											
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi DT	persen	4.64	4.96	5.24	5.56	5.91	6.26	6.62	6.62	
1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi TT	persen	5.18	5.52	5.83	6.20	6.53	6.95	7.39	7.39	
1.3	PDRB Perkapita DT	juta rupiah	58.68	59.13	59.58	59.86	60.13	60.58	60.94	60.94	
1.4	PDRB Perkapita TT	juta rupiah	37.52	39.82	42.19	44.77	47.50	50.50	53.43	53.43	
1.5	Tingkat Inflasi	persen	2.41	2.41	2.36	2.36	2.34	2.30	2.26	2.26	
1.6	Rasio Gini	indeks	0.4000	0.3973	0.3946	0.3919	0.3893	0.3866	0.3840	0.3840	
1.7	Indeks Williamson Antarwilayah Adat	indeks	0.832	0.777	0.754	0.691	0.625	0.607	0.564	0.564	
1.8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	59.09	60.19	61.15	62.2	63.27	64.36	65.47	65.47	
1.9	Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago	persen	32.32	31.78	31.25	30.71	30.23	29.72	29.23	29.23	
1.10	Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri	persen	30.12	29.80	29.47	29.15	28.81	28.48	28.16	28.16	
1.11	Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago	persen	36.30	35.89	35.48	35.04	34.60	34.20	33.80	33.80	
1.12	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. juta	13.21	14.69	16.34	18.17	20.21	22.48	25.00	25.00	
1.13	Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen	74.37	76.04	77.76	79.51	81.30	83.13	85.00	85.00	
1.14	Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	persen	80	80	85	85	90	90	95	95	
1.15	Cakupan inovasi pelayanan publik yang masuk dalam List Outstanding (terpuji)	persen	0	0	1	1	1	1	1	5	
1.17	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	persen	-	75.38	30.00	40.00	50.00	70.00	85.00	85.00	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.18	Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	persen	48.24	36.70	39.04	41.53	44.18	47.00	50.00	50.00	
1.19	Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	persen	-	50.00	53.48	57.20	61.19	65.44	70.00	70.00	
1.22	Ketepatan waktu Penetapan APBD	Kategori	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	
1.23	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	7.81	8.61	9.49	10.46	11.52	12.70	14.00	14.00	
1.24	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen			30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00	
1.25	Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	kab/kota	0	0	5	5	6	6	7	29	
1.26	Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	4.88	5.08	5.29	5.50	5.72	5.96	6.20	6.20	
1.27	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	9.49	10.12	10.80	11.52	12.30	13.12	14.00	14.00	
1.28	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	C	C	C	CC	CC	B	B	B	
1.29	Indeks Pelayanan Publik	Nilai indeks	C-	C-	C-	C	C	B-	B	B	
1.30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	C	C	C	B	B	B	A	A	
1.31	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	orang per hari	-	-	150	150	200	250	300	300	
1.32	Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	nilai	0	0	50	60	65	70	75	75	
1.33	Tingkat Kerentanan Sosial	kategori	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	
Kesejahteraan sosial											
1. Pendidikan											
1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	10.5	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7	12.0	12.00	
1.2	Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	40.00	42.80	45.79	48.99	52.41	56.08	60.00	60.00	
1.4	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	7.48	8.09	8.75	9.47	10.25	11.09	12.00	12	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	88.63	90.43	92.27	94.14	96.06	98.01	100.00	100.00	
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	78.83	79.83	80.84	81.86	82.89	83.94	85.00	85.00	
1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat	persen	56.13	56.76	57.39	58.03	58.68	59.34	60.00	60.00	
2. Kesehatan											
2.1	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	65.08	65.56	66.04	66.53	67.01	67.50	68.00	68	
2.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 klh	7.00	6.38	5.81	5.29	4.82	4.39	4.00	4.00	
2.3	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	persen	11.30	10.02	8.89	7.88	6.99	6.20	5.50	5.50	
3. Pangan											
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks		37.09	39.53	42.13	44.90	47.85	51.00	51.00	
3.2	Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	26.95	27.44	27.93	28.43	28.95	29.47	30.00	30	
3.3	Persentase penduduk tahan pangan	persen	40.04	42.83	45.82	49.01	52.43	56.09	60.00	60	
4. Ketenagakerjaan											
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3.62	2.91	2.70	2.50	2.32	2.16	2.00	2.00	
4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	76.94	77.44	77.95	78.46	78.97	79.48	80.00	80.00	
5. Pemberdayaan											
5.1	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang	persen	5.37	6.94	8.97	11.59	14.97	19.35	25.00	25.00	
5.2	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen		30.00	34.46	39.59	45.47	52.23	60.00	60.00	
5.3	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	
6. Seni Budaya dan Olahraga											

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
6.1	Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen			40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00	
6.2	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0	0	0	0	1	0	1	2	
6.3	Cakupan kurikulum muatan lokal	persen			2	2	2.5	2.5	5	5	
6.4	Indeks Pembangunan Olah Raga	Tingkatan Status	-	-	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
6.5	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	30	30	40	80	85	95	100	100	
ASPEK DAYA SAING DAERAH											
Kemampuan Ekonomi Daerah											
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1	NTP perikanan tangkap	Skor	103.75	103.96	104.17	104.37	104.58	104.79	105.00	105	
1.2	NTP perikanan budidaya	Skor	83.27	85.85	88.51	91.25	94.08	96.99	100.00	100	
1.3	Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan	0.22	0.33	0.49	0.74	1.10	1.65	2.46	2.46	
1.4	Pendapatan Per Kapita Petani	Rp juta per kapita	10.21	10.34	10.63	11.00	11.45	12.24	13.12	13.12	
1.5	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87.6	88.00	88.39	88.79	89.19	89.60	90.00	90	
1.6	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	-	-	45	50	55	60	65	70	
1.7	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2.00	2.20	2.41	2.65	2.90	3.19	3.50	3.50	
1.8	Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	1.29	1.48	1.71	1.97	2.26	2.61	3.00	3	
1.9	Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	Jumlah	0	0	1	1	2	2	4	10	
1.10	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	52	53.66	54.88	56.11	57.38	58.68	60.00	60	
1.11	Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah	3428	3517	3609	3703	3799	3898	4000	4000	
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
1. Perhubungan											

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	persen	55.17	55.17	58.62	65.52	72.41	79.31	93.10	93.10	
2. Listrik Dan Air Bersih											
2.1	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	unit	40.57	41.28	41.99	42.73	43.47	44.23	45.00	45.00	
2.2	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	33.06	34.12	35.22	36.36	37.54	38.75	40.00	40	
2.3	Backlog perumahan layak huni dan sehat	ribu ruta	147.88	138.55	129.80	121.61	113.93	106.74	100.00	100.00	
3. Lingkungan Hidup											
3.1	Laju Deforestasi	ribu hektar	48.6	43.50	38.94	34.86	31.20	27.93	25.00	25.00	
3.2	Tingkat Emisi Karbon	Ton CO2	0.392	0.371	0.351	0.332	0.315	0.298	0.282	0.282	
3.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	81.47	82.06	82.64	83.21	83.83	84.44	85.03	85.03	
3.4	Persentase penerapan green economy	persen			50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	70.00	
3.5	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupee	-	-	31580.25	39475.31	47370.37	55265.43	63160.49	63160.49	
3.6	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen			60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	
3.7	Persentase pengendalian daya rusak air	persen			40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00	
4. Informasi Dan Komunikasi											
4.1	Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi	Kategori			C	C	C	B	B	B	
4.2	Cakupan layanan telekomunikasi	persen			40	45	50	55	60	60	
4.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen			5	7.25	7.5	8	10	10	
Iklim Berinvestasi											
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1	Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	236	218	202	187	173	159	147	147	
1.2	Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	61.02	61.36	61.70	62.04	62.39	62.73	63.08	63.08	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.3	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3	15	
1.4	Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	90	90	80	60	40	30	20	20	
1.5	ICOR	nilai	5.13	4.75	4.39	4.06	3.76	3.48	3.21	3.21	
1.6	Indeks Kemahalan Konstruksi	persen	229.82	224.56	219.42	214.39	209.48	204.69	200.00	200.00	
ASPEK PELAYANAN UMUM											
1.	Layanan Urusan Wajib Dasar										Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.1.	Pendidikan										
1.1.1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	0.56	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29	0.25	0.25	
1.1.2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat	persen	1.21	1.17	1.14	1.10	1.07	1.03	1.00	1.00	
1.1.3	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	persen	22.48	23.59	24.75	25.97	27.25	28.59	30.00	30.00	
1.1.4	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	persen	22.37	23.49	24.67	25.91	27.21	28.57	30.00	30.00	
1.1.5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	murid per guru	24.20	24.33	24.46	24.60	24.73	24.86	25.00	25.00	
1.1.6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	murid per guru	16.76	17.91	19.15	20.47	21.88	23.39	25.00	25.00	
1.1.7	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	murid per sekolah	181.00	184.04	187.12	190.26	193.45	196.70	200.00	200.00	
1.1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama	murid per sekolah	196.09	196.73	197.38	198.03	198.69	199.34	200.00	200.00	
1.1.9	Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas	persen	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	33.88	34.83	35.81	36.81	37.85	38.91	40.00	40.00	
1.1.11	Angka Putus Sekolah (APTS SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	0.93	0.84	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.50	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.12	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik	persen	33.87	34.82	35.80	36.81	37.84	38.90	39.99	40.00	
1.1.13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per guru	13.13	14.62	16.27	18.12	20.17	22.46	25.00	25.00	
1.1.14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per sekolah	262.00	250.47	239.45	228.91	218.84	209.21	200.00	200.00	
1.1.15	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	persen	73.98	74.95	75.93	76.93	77.94	78.96	80.00	80.00	
1.1.16	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun	persen	89.32	90.24	91.17	92.12	93.07	94.03	95.00	95.00	
1.1.17	Jumlah PKBM aktif	unit	388.00	398.00	411.00	420.00	434.00	443.00	448.00	448.00	
1.1.18	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	70.73	71.42	72.13	72.83	73.55	74.27	75.00	75.00	
1.1.19	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	60.00	62.95	66.04	69.28	72.68	76.25	80.00	80.00	
1.1.20	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	80.00	80.81	81.63	82.46	83.30	84.15	85.00	85.00	
1.1.21	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	75.00	76.28	77.58	78.90	80.24	81.61	83.00	83.00	
1.1.22	Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	persen	75.00	76.43	77.89	79.37	80.89	82.43	84.00	84.00	
1.1.23	Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	persen	60.00	61.56	63.16	64.81	66.49	68.22	70.00	70.00	
1.1.24	Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	persen	45.00	46.67	48.40	50.20	52.06	54.00	56.00	56.00	
1.1.25	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	persen	-	2.50	5.00	7.00	10.00	15.00	20.00	20.00	
1.1.26	Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	unit per tahun	10.00	10.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	17.00	
1.1.27	Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	unit	15.00	18.68	23.27	28.98	36.10	44.96	56.00	56.00	
1.1.28	Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring	persen	80.00	75.38	71.03	66.93	63.07	59.43	56.00	56.00	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.29	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu	persen	85.00	86.59	88.21	89.86	91.54	93.26	95.00	95.00	
1.1.30	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu	persen	60.00	61.56	63.16	64.81	66.49	68.22	70.00	70.00	
1.1.31	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu	persen	50.00	52.23	54.57	57.01	59.56	62.22	65.00	65.00	
1.1.32	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	persen	20.44	21.14	21.86	22.61	23.38	24.17	25.00	25.00	
1.1.33	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	orang per tahun	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00	
1.1.34	Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	orang	700.00	795.00	903.00	1025.00	1164.00	1322.00	1500.00	1500.00	
1.1.35	Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	unit	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	
1.1.36	Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	persen	2.92	3.59	4.40	5.40	6.64	8.15	10.00	10.00	
1.1.37	Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	rasio siswa SLB per rombel	10.60	11.78	13.09	14.56	16.18	17.99	20.00	20.00	
1.1.38	APM pendidikan khusus	persen	-	-	10.00	10.52	11.07	11.64	12.25	12.25	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.2.	Kesehatan										
1.2.1	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	7.63	9.59	12.04	15.13	19.01	23.88	30.00	30.00	
1.2.2	Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	5.84	6.45	7.13	7.88	8.70	9.61	10.62	10.62	
1.2.3	Cakupan puskesmas pembantu	per 100.000 penduduk	94.48	102.05	110.22	119.05	128.58	138.88	150.00	150.00	
1.2.4	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	persen	-	-	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	70.00	
1.2.5	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	persen	-	-	25.00	25.00	30.00	35.00	40.00	40.00	
1.2.6	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	-	27.59	34.92	44.20	55.95	70.83	89.66	89.66	
1.2.7	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD	persen	-	60.00	60.00	65.00	65.00	70.00	75.00	75.00	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas										
1.2.9	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	35.21	36.68	38.21	39.81	41.47	43.20	45.00	45.00	
1.2.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	persen	3.45	6.90	13.79	20.69	27.59	34.48	41.38	41.38	
1.2.11	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen	-	80	82	85	87	90	92	436	
1.2.12	Persentase PAK yang diawasi	persen	-		58	68	78	88	100	392	
1.2.13	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	jumlah	-	-	10.00	10.00	15.00	20.00	25.00	25.00	
1.2.14	API Malaria	persen	59.00	51.35	44.69	38.89	33.85	29.46	25.64	25.64	
1.2.15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	62.78	56.30	50.48	45.27	40.59	36.40	32.64	32.64	
1.2.16	Tingkat prevalensi DBD	persen	92.67	86.37	80.50	75.03	69.93	65.17	60.74	60.74	
1.2.17	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	42.00	39.83	37.78	35.83	33.98	32.23	30.57	30.57	
1.2.18	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1.000 penduduk	-	11.70	11.10	10.53	10.00	9.48	9.00	9.00	
1.2.19	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1.000 penduduk	48.00	45.36	42.86	40.50	38.28	36.17	34.18	34.18	
1.2.20	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	-	-	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00	
1.2.21	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	persen	-	-	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00	100.00	
1.2.22	Cakupan pelayanan keehatan lembaga mitra di 5 wilayah adat	kab/kota	-	6.00	7.00	9.00	12.00	14.00	16.00	16.00	
1.2.23	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	-	-	25.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	
1.2.24	Unmet need pelayanan kesehatan	persen	2.63	2.93	3.26	3.63	4.04	4.49	5.00	5.00	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.26	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	289.00	259.08	232.25	208.21	186.65	167.32	150.00	150.00	
1.2.27	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	40.90	43.60	46.47	49.54	52.81	56.29	60.00	60.00	
1.2.28	Cakupan pelayanan nifas	persen	35.80	37.19	38.64	40.14	41.70	43.32	45.00	45.00	
1.2.29	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	61.59	62.15	62.71	63.27	63.84	64.42	65.00	65.00	
1.2.31	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	32.80	31.35	29.96	28.64	27.37	26.16	25.00	25.00	
1.2.32	Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	1.60	1.38	1.18	1.02	0.88	0.76	0.65	0.65	
1.2.33	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen	-	-	20.00	20.00	25.00	25.00	40.00	40.00	
1.2.34	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 klh	8.00	7.13	6.35	5.66	5.04	4.49	4.00	4.00	
1.2.35	Rasio posyandu yang aktif	persen	63.57	64.60	65.64	66.71	67.79	68.88	70.00	70.00	
1.2.36	Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	48.89	49.40	49.91	50.42	50.94	51.47	52.00	52.00	
1.2.37	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi		46.00	46.95	47.92	48.91	49.92	50.95	52.00	52.00	
1.2.38	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	persen	2115.09	2144.84	2175.01	2205.61	2236.63	2268.10	2300.00	2300.00	
1.2.39	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	persen	20.00	23.30	27.14	31.62	36.84	42.92	50.00	50.00	
1.2.40	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	45.00	48.44	52.14	56.12	60.41	65.03	70.00	70.00	
1.2.41	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	-	21.00	21.00	22.00	24.00	25.00	27.00	27.00	
1.2.42	Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat	unit	-	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	8.00	8.00	
1.2.43	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 30.000 penduduk	25.00	25.00	25.77	26.57	27.39	28.23	29.10	30.00	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.44	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	1.12	1.41	1.78	2.24	2.83	3.57	4.50	4.50	
1.2.45	Rasio Dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	24.13	25.06	26.02	27.02	28.05	29.13	30.25	30.25	
1.2.46	Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1.03	1.05	1.08	1.11	1.14	1.17	1.20	1.20	
1.2.47	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen	-	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	
1.2.48	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	persen	-	85.00	85.00	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00	
1.2.49	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen	-	-	40.00	43.00	50.00	55.00	60.00	60.00	
1.2.50	Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten per tahun	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-	2.00	4.00	
1.2.51	Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi	persen	56.25	56.86	57.47	58.09	58.72	59.36	60.00	60.00	
1.2.52	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	10.00	12.60	15.87	20.00	25.20	31.75	40.00	40.00	
1.2.53	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	-	60	60,00	65	70,00	75,00	80,00	80,00	
1.2.54	Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	-	-		-	-	-	-	-	
1.2.55	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	-	44,83	48,28	48,28	51,72	55,17	58,62	58,62	
1.2.56	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen		60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	
1.2.57	Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	41.84	42.35	42.87	43.39	43.92	44.46	45.00	45.00	
1.2.58	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	-	44.83	48.28	48.28	51.72	55.17	58.62	58.62	
1.2.59	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen		60.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.60	Tingkat kecukupan tenaga medis sesuai dengan standar rumah sakit	persen	60.00	62.25	65.00	67.50	70.00	72.50	73.00	73.00	
1.2.61	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar	persen	-	-	70	72	75	78	80	80	
1.2.62	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	persen	-	-	80	82	84	86	90	90	
1.2.63	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	persen	33.06	34.12	35.22	36.36	37.54	38.75	40.00	40.00	
1.2.64	Cakupan keluarga terakses air bersih	persen	38.47	39.52	40.61	41.72	42.87	44.04	45.25	45.25	
1.2.65	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	orang	-	-	250	250	-	-	-	250	
1.2.66	Jumlah Pos dan Peralatan kesehatan yang memenuhi standar nasional untuk pelaksanaan PON	unit	-	-	40	40	-	-	-	40	
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.3.1.	Pekerjaan Umum										Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.1	Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	hektar	-	-	1000	2000	3000	4000	5000	39600	
1.3.1.2	Persentas luas lahan yang terlayani irigasi	persen	-	-	75	80	85	90	95	95	
1.3.1.3	Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	ton per hektar	44.55	46.82	49.20	51.70	54.33	57.10	60.00	60	
1.3.1.4	Cakupan layanan air bersih/air minum	persen		48	50	52	54	56	60	60	
1.3.1.5	Terpeliharanya sempadan sumber air	sungai/ lokasi	-	-	20	20	20	20	20	100	
1.3.1.6	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	m	-	-	40	50	60	70	80	80	
1.3.1.7	Panjang jalan provinsi yang fungsional	km	-	-	20	20	20	20	20	100	
1.3.1.8	Panjang jembatan yang fungsional	m'	-	-	500	500	500	500	500	2500	
1.3.1.9	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	-	-	34	38	40	45	50	55	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.3.1.10	Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	persen	-	-	40	45	50	55	60	60	
1.3.1.11	Panjang jalan dalam kondisi mantap	km	-	-	10	20	20	20	30	100	
1.3.1.12	Panjang jembatan dalam kondisi mantap	meq	-	-	30	30	30	30	30	150	
1.3.1.13	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	persen	-	-	60	65	70	75	80	80	
1.3.1.14	Cakupan keterlayanan air baku	persen	-	-	30	35	40	45	50	50	
1.3.1.15	Cakupan keterlayanan air bersih	persen	38.47	40.19	41.98	43.86	45.82	47.86	50.00	50	
1.3.1.16	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besa	persen	69.16	70.86	72.60	74.38	76.21	78.08	80.00	80	
1.3.1.17	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	persen	-	-	30	35	40	45	50	50	
1.3.1.18	Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	persen	-	-	50	55	60	65	70	70	
1.3.2.	Penataan Ruang										
1.3.2.1	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	persen	-	-	80	85	90	95	100	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.3.2.2	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	-	-	30	50	70	100	100	100	
1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
1.4.1	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen	-	-	60	65	70	75	80	80	
1.4.2	Cakupan rumah layak huni yang terbangun	unit	-	-	3000	3000	3000	3000	3000	15000	
1.4.3	Persentase lingkungan permukiman yang sehat	persen	-	-	30	35	40	45	50	50	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
1.4.4	Cakupan rumahtangga yang menggunakan air ledeng	per 1000 kk	-	-	125	180	230	300	380	380	
1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat										
1.5.1	Jumlah konflik horisontal	kasus	-	10.00	10.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	
1.5.2	Cakupan penegakan Perda	persen	-	80.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.5.3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	8.70	9.99	11.48	13.19	15.15	17.41	20.00	20.00	Masyarakat
1.5.4	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	3.02	2.59	2.22	1.90	1.63	1.40	1.20	1.20	
1.5.5	Jumlah konflik horisontal	kasus	-	10.00	10.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	
1.5.6	Cakupan penegakan Perda	persen	-	80.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.5.7	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	8.70	9.99	11.48	13.19	15.15	17.41	20.00	20.00	
1.5.8	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	3.02	2.59	2.22	1.90	1.63	1.40	1.20	1.20	
1.5.9	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persen	-	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	65.00	
1.5.10	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	rasio	63.45	65.67	67.97	70.35	72.81	75.36	78.00	78.00	
1.5.11	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	-	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00	85.00	
1.5.12	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	persen	-	28.00	32.00	36.00	40.00	45.00	50.00	50.00	
1.5.13	Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	persen	-	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	65.00	
1.5.14	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	kali	-	-	2	2	2	2	2	10	
1.5.15	Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	orang	-	-	250	250	250	250	250	1250	
1.5.16	Cakupan fasilitas Forkompimda	kali	-	-	5	5	5	5	5	25	
1.5.17	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	persen	-	-	2.00	2.00	2.25	2.50	3.00	3.00	
1.5.18	Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	-	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	50.00	50.00	
1.5.19	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi	persen	-	-	2.50	2.50	5.00	5.00	10.00	10.00	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	dalam pendidikan menengah										
1.5.20	Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	persen	-	-	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	
1.5.21	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	-	-	75.00	-	-	-	-	75.00	
1.5.22	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	persen	-	-	80.00	80.00	85.00	85.00	90.00	90.00	
1.5.23	Cakupan pertemuan dengan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan	kali	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
1.5.24	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	-	-	60	65	70	75	80	80	
1.5.25	Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	-	-	2	2	2	2	2	10	
1.5.26	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen	-	-	80	85	90	95	100	100	
1.5.27	Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen	-	-	80	80	90	90	100	100	
1.5.28	Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen	-	-	20	25	30	35	40	40	
1.5.29	Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen	-	-	80	85	90	95	100	100	
1.6.	Sosial										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
1.6.1	Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	persen	-	-	40	45	50	55	60	60	
1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	-	-	30	35	40	45	50	50	
1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	25.00	28.51	32.51	37.08	42.29	48.23	55.00	55.00	
1.6.4	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	KK	-	-	200	200	200	200	200	1000	
1.6.5	Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	persen	-	-	70	75	80	85	90	90	
1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana	persen	-	-	65	70	75	80	85	85	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	prasarana pelayanan kesejahteraan sosial										
1.6.7	Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	persen	-	-	80	85	90	95	100	100	
1.6.8	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	persen	-	-	30	35	40	45	50	50	
1.6.9	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	persen	-	-	15	20	25	30	35	35	
1.6.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	kab/kota	-	9	12	15	18	21	24	24	
1.6.11	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	-	-	50	50	50	50	50	250	
1.6.12	Jumlah anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	-	-	250	250	250	250	250	1250	
1.6.13	Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	-	-	30	35	40	45	50	50	
1.6.14	Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	-	-	60	65	70	75	80	80	
1.6.15	Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	dokumen	-	-	2	2	2	2	2	10	
2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
2.1.	Tenaga Kerja										
2.1.1	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	persen	-	-	80	85	90	95	100	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
2.1.2	Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	kali	-	-	2	2	2	2	2	10	
2.1.3	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	-	-	80	80	85	85	90	90	
2.1.4	Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	-	-	25	25	30	40	50	50	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.1.5	Persentase kenaikan UMP	persen	-	-	1.5	1.5	2.3	3.5	4.0	4.0	
2.1.6	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	persen	-	-	30	35	40	50	60	60	
2.1.7	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	76.94	77.44	77.95	78.46	78.97	79.48	80.00	80.00	
2.1.8	Tingkat pengangguran terbuka	persen	3.62	2.91	2.70	2.50	2.32	2.16	2.00	2.00	
2.1.9	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial	persen	-	-	40	45	50	55	60	60	
2.1.10	Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	persen	-	-	60	65	70	75	80	80	
2.2.	Pangan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
2.2.1	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	-	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00	25.00	
2.2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	persen	60.00	56.08	52.41	48.99	45.79	42.80	40.00	40.00	
2.2.3	Skor PPH	skor	87.60	88.43	89.26	90.10	90.95	91.81	92.67	92.67	
2.3.	Pertanahan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
2.3.1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	-	-	60	65	70	75	80	80	
2.3.2	Cakupan tanah adat yang terpetakan	persen	-	-	20	30	40	50	60	60	
2.4.	Lingkungan Hidup										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
2.4.1	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	titik sungai	14	14	20	20	20	20	20	100	
2.4.2	Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	lokasi per kab/kota	15/5	15/5	20/5	40/8	50/10	50/10	50/10	50/10	
2.4.3	Proporsi degradasi lahan yang tercemar	persen	6.84	5.57	4.54	3.70	3.01	2.45	2.00	2.00	
2.4.4	Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	persen	-	-	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	
2.4.5	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	kali	-	-	12	12	12	12	12	60	
2.4.6	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	lokasi	-	-	1	1	1	1	1	5	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.4.7	Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	persen	-	-	60	65	70	75	80	80	
2.4.8	Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	persen	-	-	20	25	30	35	40	40	
2.4.9	Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	persen	-	-	30	35	40	45	50	50	
2.4.10	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang	-	12	12	12	12	16	20	20	
2.4.11	Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang	-	2	-	-	1	2	2	5	
2.5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.5.1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.5.2	Cakupan penduduk ber KTP elektronik	persen	64.25	67.42	70.75	74.24	77.90	81.75	85.78	85.78	
2.5.3	Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	29.70	31.91	34.28	36.83	39.57	42.51	45.67	45.67	
2.5.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	persen	44.06	45.77	47.54	49.38	51.29	53.28	55.34	55.34	
2.5.5	Persentase pasangan berakta nikah	persen	-	40	45	50	55	60	65	65	
2.6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.6.1	Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	persen	-	-	25	30	35	40	45	45	
2.6.2	Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	unit	-	-	10	10	10	10	10	50	
2.6.3	Persentase kampung tertinggal	persen	-	87.12	84.55	82.05	79.63	77.28	75.00	75.00	
2.6.4	Cakupan kampung mandiri	kampung	-	10	2	2	4	4	5	17	
2.6.5	Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampung	-	-	10	10	10	10	10	50	
2.6.6	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen	-	-	10	15	20	25	30	30	
2.7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		-	-							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.7.1	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelompok per tahun	-	-	100	100	100	100	100	500	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.7.2	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	persen	-	3.26	3	3	2.8	2.5	2.25	2,25	
2.7.3	Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen	-	60	60	65	70	75	80	80	
2.7.4	Cakupan kampung KB	persen	-		20	25	30	35	40	40	
2.7.5	Cakupan tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun	-	-	30	30	30	30	30	150	
2.8.	Perhubungan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
2.8.1	Cakupan terintegrasinya antarmoda angkutan antarwilayah adat	wilayah adat	-	1	1	2	2	3	3	3	
2.8.2	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen	-	20	20	25	30	35	40	40	
2.8.3	Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa	-	200	180	160	140	120	100	100	
2.8.4	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit	-	7	1	1	1	1	1	5	
2.8.5	Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit	-	5	1	1	1	1	1	5	
2.8.6	Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit	-	6	-	-	1	-	1	2	
2.8.7	Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit	-	3	2	2	2	2	2	10	
2.8.8	Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen	-	5.0	5.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	
2.8.9	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen	-	-	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	4.5	
2.8.10	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen	-	-	60	65	70	75	80	80	
2.9.	Komunikasi dan Informatika										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
2.9.1	Cakupan pemenuhan kebutuhan akses internet dalam pelaksanaan PON	mbps	-	-	-	3200.00					
2.9.2	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil hasil pembangunan	kerjasama	-	-	2	2	2	2	2	10	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.9.3	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen	-	-	10	10	20	20	40	40	
2.9.4	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen	-	-	20	25	30	35	40	40	
2.9.5	Persentase penduduk yang mengakses internet	persen	16.51	17.05	17.60	18.17	18.76	19.37	20.00	20.00	
2.9.6	Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	persen	-	-	60	65	70	75	80	80	
2.10.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.10.1	Cakupan UMKM lokal yang bermitra dalam pelaksanaan PON	unit	-	-	50	50				50	
2.10.2	Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan	persen	-	-	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.25	
2.10.3	Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda	unit	7386.00	7769.00	8171.00	8594.00	9039.00	9507.00	10000.00	10000.00	
2.10.4	Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha	unit	-	-	30	30	30	30	30	150	
2.10.5	Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri	kali	-	-	5	5	8	8	10	36	
2.10.6	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah	kelompok	-	-	10	10	10	10	10	50	
2.10.7	Penyaluran kredit UMKM dari sektor perbankan	Rp milyar	10,156	10,838	11,566	12,343	13,171	14,056	15,000	15,000	
2.10.8	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	-	60	60	65	65	70	75	75	
2.11.	Penanaman Modal										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
2.11.1	Persentase realisasi investasi	persen	-	-	80	85	90	95	100	100	
2.11.2	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen	-	6.5	6.5	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	
2.11.3	Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	persen	-	-	15	20	25	30	35	35	
2.11.4	Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam	kali	-	-	5	5	5	5	5	25	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	ajang pameran tingkat nasional/internasional										
2.11.5	Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional	persen	-	-	40	50	60	70	80	80	
2.11.6	Lama waktu penerbitan izin investasi	hari	-	60	40	30	20	10	10	10	
2.11.7	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Skor	-	65	66.68	68.40	70.17	71.98	73.84	77.25	
2.11.8	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	persen	-	-	65	70	75	80	85	85	
2.12.	Kepemudaan dan Olah Raga										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
2.12.1	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organisasi	-	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
2.12.2	Cakupan monitoring atlet berprestasi	persen	-	-	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	95.00	
2.12.3	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	orang	-	-	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	
2.12.4	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-	-	10.00	10.00	-	-	-	10.00	
2.12.5	Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-	-	-	6.00	-	-	-	6.00	
2.12.6	Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua	persen	-	75.00	100.00	-	-	-	-	100.00	
2.12.7	Cakupan venue berstandar internasional	persen	30.00	60.00	90.00	100.00	-	-	-		
2.12.8	Cakupan penyelesaian Stadion utama untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	persen	50.00	50.00	100.00	100					
2.12.9	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00	
2.12.10	Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	47.00	49.00	51.00	53.00	55.00	57.00	59.00	60.00	
2.13.	Statistik										Urusan Pemerintahan Fungsi
2.13.1	Cakupan ketersediaan data SIPD	persen	-	70	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.0	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.13.2	Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen	-	5	5	5	5	5	5	25	Penunjang Statistik
2.14.	Persandian										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
2.14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	-	85	85	85	90	95	100	100	
2.15.	Kebudayaan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
2.15.1	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat	kurikulum	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
2.15.2	Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali	-	-	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	7.00	
2.15.3	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
2.15.4	Frekwensi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali	-	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	31.00	
2.15.5	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	
2.15.6	Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen	-	40.00	40.00	45.00	45.00	50.00	50.00	50.00	
2.15.7	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	jumlah	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	
2.16.	Perpustakaan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
2.16.1	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	persen	-	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00	
2.16.2	Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan	persen	-	-	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	
2.17.	Kearsipan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
2.17.1	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	-	85.00	85.00	85.00	90.00	90.00	95.00	95.00	
2.17.2	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan	persen	-	-	1.20	2.00	2.25	3.00	4.00	4.00	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	dan kepastakaan										
3.	Layanan Urusan Pilihan										
3.1.	Pariwisata										Urusan Pilihan Pariwisata
3.1.1	Jumlah kunjungan wisatawan PON yang terlayani	ribu orang	-	-	-	150	-	-	-	150	
3.1.2	Destinasi wisata unggulan yang berkembang	destinasi	-	10	10	12	12	15	15	15	
3.1.3	Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasan	-	2	1	1	1	1	1	5	
3.1.4	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusahaan	-	-	10	10	10	10	10	50	
3.1.5	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang	-	-	50	50	50	50	50	250	
3.1.6	Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengusaha	-	-	10	10	10	10	10	50	
3.2.	Pertanian										Urusan Pilihan Pertanian
3.2.1	Cakupan bina kelompok tani	persen	-	-	20	20	20	20	20	100	
3.2.2	NTP peternakan	persen	99.89	99.91	99.93	99.94	99.96	99.98	100.00	100	
3.2.3	NTP tanaman pangan	persen	86.31	88.45	90.65	92.90	95.21	97.58	100.00	100	
3.2.4	Cakupan bina kelompok tani	persen	-	-	20	20	20	20	20	100	
3.2.5	NTP perkebunan	persen	99.89	99.91	99.93	99.94	99.96	99.98	100.00	100	
3.2.6	NTP tanaman pangan	persen	86.31	88.45	90.65	92.90	95.21	97.58	100.00	100	
3.2.7	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton per hektar	7.37	8.00	8.16	8.58	9.03	9.50	10.00	10	
3.2.8	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	persen	-	-	-	60	-	-	-		
3.2.9	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	2.67	2.86	3.06	3.27	3.50	3.74	4.00	4.00	
3.2.10	Tingkat swasembada pangan	persen	-	-	25	30	35	40	45	45	
3.2.11	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	persen	-	60	65	70	75	80	85	85	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.2.12	Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis	persen	-	-	30	35	40	45	50	50	
3.2.13	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	persen	-	-	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	
3.2.14	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan	-	-	2	2	2	2	2	10	
3.2.15	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	jenis	-	-	10	10	12	12	15	15	
3.2.16	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg per hektar	485.22	489.26	493.34	497.46	501.60	505.78	510.00	510	
3.2.17	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	-	-	25	30	35	40	45	45	
3.2.18	Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	-	-	2	2	2	2	2	10	
3.2.19	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persen	-	-	50	55	60	65	70	70	
3.2.20	Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	Ton	30,146,247	31,277,043	32,450,255	33,667,475	34,930,354	36,240,603	37,600,000	37,600,000	
3.2.21	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	-	30	32	34	36	38	40	40	
3.2.22	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen	-	10	10	10	15	15	25	25	
3.3.	Kehutanan										Urusan Pilihan Kehutanan
3.3.1	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp milyar	2,051.75	2,120.45	2,191.44	2,264.81	2,340.64	2,419.01	2,500.00	2,500.00	
3.3.2	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen	-	26.41	27.09	27.79	28.51	29.24	30.00	30	
3.3.3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	-	4,641.81	4,761.77	4,884.83	5,011.07	5,140.57	5,273.42	3,000.00	
3.3.4	Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen	-	5	10	15	20	25	30	30	
3.3.5	Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.3.6	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen	-	-	30	35	40	45	50	50	
3.4.	Energi dan Sumber Daya Mineral										Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
3.4.1	Cakupan pemenuhan air bersih dalam pelaksanaan PON	m3/jam	-	-	-	432	-	-	-	432	
3.4.2	Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON	persen				100.00	-	-	-	100	
3.4.3	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	persen	-	-	80	85	90	95	100	100	
3.4.4	Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen	-	-	40	45	50	55	60	60	
3.4.5	Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan	persen	-	-	80	85	90	95	100	100	
3.4.6	Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen	-	-	25	50	75	100	100	100	
3.4.7	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen	-	-	30	40	50	60	70	70	
3.4.8	Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen	-	-	65	80	90	100	100	100	
3.4.9	Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen	-	-	40	50	60	70	80	80	
3.4.10	Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	rp per liter	-	10,000	10,000	9,800	9,800	9,500	9,500	9,500	
3.4.11	Tingkat elektrifikasi	persen	53.20	54.28	55.38	56.50	57.64	58.81	60.00	60	
3.4.12	Persentase kampung terakses listrik	persen	43	45.46	48.05	50.79	53.69	56.76	60.00	60	
3.4.13	Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	ruta	-	-		250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00	
3.4.14	Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	ruta	-	-	500	500	500	500	500	2500	
3.4.15	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	-	-	100	100	100	100	100	500	
3.5.	Perdagangan										Urusan Pilihan

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.5.1	Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	persen	280.00	258.90	239.40	221.36	204.68	189.26	175.00	175.00	Perdagangan
3.5.2	Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	persen	-	-	80	80	85	85	90	90	
3.5.3	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	-	-	100	100	100	100	100	100	
3.5.4	Nilai ekspor Non Migas Papua	Rp milyar	2,008.10	2,147.05	2,295.61	2,454.44	2,624.27	2,805.86	3,000.00	3,000.00	
3.5.5	Cakupan pasar rakyat yang fungsional	unit	-	-	20	20	20	20	20	100	
3.5.6	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen	-	-	2.50	3.00	3.25	3.50	4.00	4.00	
3.5.7	Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen	-	-	250	225	200	175	150	150	
3.5.8	Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumah tangga	persen	12.52	12.94	13.37	13.82	14.28	14.76	15.25	15.25	
3.6.	Perindustrian										Urusan Pilihan Perindustrian
3.6.1	Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun	-	-	10	10	10	10	10	50	
3.6.2	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	unit usaha	-	-	50	50	50	50	50	250	
3.6.3	Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	kawasan	-	-	1	1	1	1	1	5	
3.7.	Kelautan dan Perikanan										Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
3.7.1	Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	persen	-	-	1.25	1.50	1.75	1.80	2.00	2.00	
3.7.2	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	kab/kota	-	-	8	10	13	13	13	13	
3.7.3	Produksi perikanan budidaya	ton	113	118.46	124.19	130.19	136.49	143.08	150.00	150.00	
3.7.4	Produksi perikanan tangkap	ton	7,403.00	7,499.31	7,596.88	7,695.71	7,795.83	7,897.26	8,000.00	8,000.00	
3.7.5	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	37,811.51	39,613.97	41,502.35	43,480.75	45,553.46	47,724.97	50,000.00	50,000.00	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.7.6	Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	6,787.68	6976.15	7169.86	7368.95	7573.57	7783.86	8000.00	8000	
3.7.7	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	persen	-	-	2	2	4	4	8	20	
3.7.8	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	persen	-	-	1.20	1.50	2.00	2.25	2.50	2.50	
3.7.9	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	-	-	60	65	70	75	80	80	
4.	Layanan Penunjang Urusan										
4.1.	Perencanaan Pembangunan										Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
4.1.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	85	88	90	100	100	100	100	100	
4.1.2	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kota	7	-	12	14	16	18	20	20	
4.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	46.39	80.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	
4.1.4	Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	70	75	85	90	90	95	100.00	100.00	
4.1.5	Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.1.6	Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	persen	86.21	89.66	93.10	96.55	100.00	100.00	100.00	100	
4.1.7	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.1.8	Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.1.9	Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.1.10	Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	persen	-	85	90	95	100	100	100	100	
4.1.11	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen	-	-	80	85	90	95	100	100	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.1.12	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	80	80	85	85	90	90	90	90	
4.1.13	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	-	-	25.00	35.36	50.00	70.71	100.00	100.0	
4.1.14	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	persen	-	-	25.00	35.36	50.00	70.71	100.00	100.0	
4.1.15	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	persen	-	-	25.00	35.36	50.00	70.71	100.00	100.0	
4.1.16	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	jumlah	-	-	4	4	4	4	4	20	
4.1.17	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen	-	-	60	70	80	90	100	100	
4.1.18	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	-	-	30	50	70	100	100	100	
4.2.	Keuangan										Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
4.2.1	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen	-	-	90	100	100	100	100	100	
4.2.2	Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	dokumen	-	1	2	-	-	-	-	2	
4.2.3	Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen	-	85	85	90	95	100	100	100	
4.2.4	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.5	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	-	-	100	100	100	100	100	100	
4.2.6	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	-	20	20	20	40	40	50	50	
4.2.7	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.2.8	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.9	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	persen	-	80	85	85	95	100	100	100	
4.2.10	Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	persen	-	-	100	100	100	100	100	100	
4.2.11	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.12	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	-	-	100	100	100	100	100	100	
4.2.13	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	-	20	20	20	40	40	50	50	
4.2.14	Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4.2.15	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.16	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.17	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	1.26	1.56	1.94	2.41	2.99	3.71	4.60	4.60	
4.2.18	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	persen	7.81	8.61	9.49	10.46	11.52	12.70	14.00	14	
4.2.19	Efektifitas pendapatan asli daerah	persen	1.96	2.10	2.26	2.42	2.60	2.79	3.00	3.00	
4.2.20	Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis	-	-	2	2	2	3	3	12	
4.2.21	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	14	16	18	20	22	26	28	28	
4.3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan										Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
4.3.1	Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	500.00	
4.3.2	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	-	3	3	3	5	5	8	8	
4.3.3	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	-	-	80	82	85	87	90	90	
4.3.4	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III	persen	-	-	70	75	80	85	90	90	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan										
4.3.5	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	-	-	65	70	75	80	85	85	
4.3.6	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang	-	-	100	100	100	100	100	500	
4.4.	Penelitian dan pengembangan										
4.4.1	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun	-	-	5	5	8	8	10	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
4.4.2	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen	-	-	40	45	50	55	60	60	
4.5	Penerapan SIDA										
4.5.1	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis	-	-	1	1	1	1	1	5	
4.6.	Pengawasan										
4.6.1	Persentase kasus pelanggaran administrasi yang tertangani	persen	-	-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
4.6.2	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	-	-	15	20	25	30	35	35	
4.6.3	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	orang per tahun	-	-	1	1	2	2	4	10	
4.6.4	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	persen	-	80	85	85	95	100	100	100	
4.6.5	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen	-	40	40	40	45	45	50	50	
4.6.6	Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen	-	20	25	25	30	35	35	35	
4.6.7	Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	persen	-	30	30	40	40	50	60	60	
4.7.	Sekretariat Dewan										Urusan

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.7.1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
4.7.2	Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
ASPEK OTONOMI KHUSUS											
1.	Layanan Urusan Wajib Dasar										
1.1.	Pendidikan										Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.1.1	Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	persen	-	-	40	43.51	47.33	51.48	56.00	56	
1.1.2	Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil	persen	-	-	85	88.52	92.20	96.02	100.00	100	
1.1.3	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD	persen	-	-	2.15	1.70	1.35	1.07	0.85	0.85	
1.1.4	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP	persen	-	-	1.22	0.82	0.55	0.37	0.25	0.25	
1.1.5	Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata	persen	-	-	35	40.05	45.83	52.44	60.00	60	
1.1.6	Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN	per 1000 siswa OAP	-	-	200	200	200	200	200	1000	
1.1.7	Angka Melek Huruf penduduk OAP	persen	-	-	45	48.36	51.96	55.84	60.00	60	
1.1.8	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan	persen	-	-	70.00	70.00	80.00	80.00	85.00	85.00	
1.1.9	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	persen	30.00	32.67	35.57	38.73	42.17	45.92	50.00	50.00	
1.1.10	Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	sekolah per tahun	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
1.1.11	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	-	60.00	62.40	64.90	67.49	70.19	73.00	73.00	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.	Kesehatan										Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.2.1	Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	persen	-	-	25	28.12	31.62	35.57	40.00	40	
1.2.2	Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	persen	-	-	60	63.44	67.08	70.93	75.00	75	
1.2.3	Cakupan balita OAP yang bergizi baik	persen	-	-	40	46.01	52.92	60.86	70.00	70	
1.2.4	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	-	-	70.00	75.00	80.00	90.00	100.00	100.00	
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.3.1	Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	persen	-	-	30	32.24	34.64	37.22	40.00	40	
1.4.	Sosial										Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
1.4.1	Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	per 1000 keluarga	-	-	250	250	250	250	250	1250	
1.5.	Pangan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
1.5.1	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	persen	-	-	20	14.14	10.00	7.07	5.00	5	
1.6.	Kepemudaan dan Olah Raga										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
1.6.1	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	-	20.00	25.00	25.00	30.00	35.00	50.00	50.00	
1.6.2	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	-	20	25	25	30	35	50	50	
1.7.	Kebudayaan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
1.7.1	Cakupan partisipasi Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional	kali	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
1.8.	Kelautan dan Perikanan										Urusan Pilihan

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.8.1	Persentase nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan	persen	127.36	173.00	234.99	319.20	433.58	588.95	800.00	800	Kelautan dan Perikanan

DAFTAR ISI

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .VIII.1	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii

DAFTAR TABEL

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2018-2023....	VIII.2
Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018-2023	VIII.4

DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.

